



## KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DAN RAKYAT DALAM ALQURAN PADA SURAH TAHA

**Suhendri<sup>1</sup>, Muhammad Ikhsan<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, Deli Serdang

\*Corresponding Email:

<sup>1</sup> [suhendri@attibyan.sch.id](mailto:suhendri@attibyan.sch.id)

<sup>2</sup> [MI.ihsaan8826@gmail.com](mailto:MI.ihsaan8826@gmail.com)

### Abstract

The problem studied in this study is formulated as follows: "how is the communication between the government and the people contained in the Qur'an surah Taha. This study aims to determine the form of communication between the people and the government which was exemplified by the Prophet Musa against Pharaoh in the Koran in the sura Taha, wherein this letter there is communication between a government and the people, which will make the research results This is a solution to the problem of people's communication with the government. This type of research is library research with a descriptive qualitative approach, and the primary data source is the Koran. From the results of this study, namely the communication of the people to the government, 11 important points need to be considered in communicating with the government contained in the Surah Taha.

**Keywords:** Government and People, Surah Ta ha.

### Abstrak

Masalah yang diteliti pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "bagaimana komunikasi antara pemerintah dan rakyat yang terdapat dalam Alquran surah Taha?". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komunikasi rakyat terhadap pemerintah yang dicontohkan oleh Nabi Musa terhadap Fir'aun dalam Alquran pada surah Taha, dimana pada surat ini terjadi komunikasi antara seorang pemerintah dan rakyat, yang akan menjadikan hasil penelitian ini sebagai solusi pemecahan masalah komunikasi rakyat terhadap pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan sumber data primer adalah kitab Alquran. Dari hasil penelitian ini yaitu komunikasi rakyat terhadap pemerintah terdapat 11 poin penting yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan pemerintah yang terdapat dalam surah Taha.

**Kata Kunci:** Pemerintah dan Rakyat, Surah Taha.

### Article Info

Article History:

Diterima Redaksi:15-06-2022 Selesai Revisi: 01-07-2022 Diterbitkan

Online:11-07-2022

DOI:

## PENDAHULUAN

Manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya komunikasi. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, karena ia adalah makhluk sosial. Hal tersebut memaksa manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain, ia harus berkomunikasi dengan individu-individu tersebut agar ia dapat berinteraksi dan berhubungan dengan baik dan memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang sempurna, Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia mulai dari yang terkecil dan sederhana yang bersifat individu seperti makan, tidur, buang air, berpakaian, hingga yang terbesar dan mencakup masyarakat dan negara.

Komunikasi yang termasuk urgen yang dibahas dalam Islam adalah komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya, karena manusia hidup berbangsa-bangsa dan bernegara. Suatu negara akan tentram apabila komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya terjalin dengan baik.

Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara keduanya dapat menghalangi kemajuan, ketertiban, keamanan dan kedamaian suatu negara, bahkan dalam kasus terburuk dapat mengantarkan suatu negara dalam kehancuran karena terjadi pertumpahan darah, parampasan harta benda dan kehormatan, serta kerusakan tersebar begitu luas.

Pada aksi demonstrasi tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan kepada awak media bahwa di Jakarta, enam polisi menjadi korban dan terluka akibat bentrokan massa, beberapa fasilitas kepolisian juga dirusak seperti pos lintas yang dirusak dan dibakar, begitu juga dengan fasilitas umum seperti halte-halte bus dirusak dan akhirnya dibakar.<sup>2</sup>

Berdasarkan data diatas, terbukti bahwa terjadi komunikasi yang tidak sehat antara pemerintah dan rakyat yang menimbulkan kekacauan yang besar seperti data diatas, oleh karena itu Penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut, meneliti bagaimana komunikasi yang baik dan benar yang seharusnya dibangun oleh masyarakat terhadap pemerintah sesuai syariat Islam.

Alquran adalah kitab suci umat Islam, sumber hukum pertama dalam Islam; yaitu kitab yang diwahyukan dari langit yang semua kabar didalamnya adalah kebenaran dan tidak

---

<sup>1</sup>Rachmat Kriyantono, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), cet. 1, h. 193.

<sup>2</sup>Maria Flora, *Demo Amarkis Ini Deretan Fasilitas Umum di Jakarta yang dirusak Massa Perusuh*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4377582/demo-anarkistis-ini-deretan-fasilitas-umum-di-jakarta-yang-dirusak-massa-perusuh>, pada tanggal 24 November 2020 pukul 23:03 WIB.

ada keraguan; pedoman dan petunjuk bagi umat Islam secara khusus dan bagi manusia secara umumnya untuk menjalankan kehidupan di dunia, sebagaimana firman Allah:

أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"Alif Lam Mim, Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa." (Q.S Al Baqarah[2] : 1-2)

Allah juga berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)." (Q.S Al Baqarah[2] : 185)

Oleh karena itu Penulis mencari solusi dalam Alquran sebagai kitab suci dengan melihat ayat-ayat yang membahas tentang masalah terkait, yaitu ayat-ayat yang menceritakan komunikasi terhadap pemimpin/penguasa negeri (pemerintah) khususnya ayat-ayat yang berkenaan dengan menegur, menasehati dan mendakwahi mereka.

Di dalam Alquran terdapat berbagai kisah yang menceritakan tentang komunikasi terhadap raja-raja atau penguasa suatu negeri yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, diantaranya adalah kisah Nabi Musa yang Allah utus untuk mendakwahi Fir'aun, yaitu mengajak Fir'aun kepada Islam dan membebaskan Bani Isrā'il,<sup>3</sup> yang mana kisah tersebut terdapat diberbagai surah dalam Alquran, diantaranya terdapat dalam Surah *Taha*, Surah *Al-A'raf* dan Surah *Asy-Syu'ara'*.

Peneliti memilih surah *Taha* untuk diteliti karena dibandingkan surah-surah yang lain, Surah *Taha* memuat lebih banyak ayat-ayat yang terkait dengan penelitian ini yaitu ayat 47-55, ayat 57-59, ayat 61-64, dan ayat 71-76. Ayat-ayat tersebut menceritakan kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Hārūn diutus untuk berbicara dua perkara kepada Raja Negeri Mesir yaitu Fir'aun, yaitu mengajak Fir'aun kepada Islam dan membebaskan Bani Isrā'il, yang mana bentuk komunikasi tersebut menjadi acuan untuk berkomunikasi terhadap pemimpin, penguasa, dan pemerintah dalam Islam.

## PEMBAHASAN

### Komunikasi Pemerintahan

---

<sup>3</sup>Abdu Ar-Rahmān Bin Nāsir As Sa'diy, *Tafsir Alquran (4)*, terj. Muhammad Iqbal, **et.al**, jilid 4 (Jakarta : Pustaka Sahifa, 2007), Cet. 2, h. 589.

Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian pemerintah kepada masyarakat berupa ide, gagasan, dan program dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Komunikasi pemerintahan sering juga disebut sebagai komunikasi politik.<sup>4</sup>

Menurut Maswardi Rauf; salah seorang pakar politik, komunikasi politik merupakan objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku politik.<sup>5</sup>

Ruang lingkup komunikasi politik dibagi dalam dua dimensi, yaitu komunikasi sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi politik sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh pelaku-pelaku politik kepada pihak lain. Adapun komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah, yaitu kegiatan politik dalam sistem politik.<sup>6</sup>

### **Komunikasi Rakyat**

Komunikasi rakyat dalam Islam sangat berbeda dari praktek-praktek yang dilakukan masyarakat kita, yaitu demonstrasi terhadap pemerintah. Dalam Islam, jika ingin berkomunikasi dengan pemerintah, menyampaikan aspirasi, dan bahkan menasehati mereka, kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan beramai-ramai di tempat terbuka sebagaimana yang terjadi pada demonstrasi, melainkan menghampirinya secara individu dan empat mata sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلاَنِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ.

*“barang siapa yang ingin menasehati seorang penguasa maka jangan ia tampakkan terang-terangan, akan tetapi hendaknya ia mengambil tangan penguasa tersebut dan menyendiri dengannya. Jika ia menerima nasehat tersebut maka itulah (yang diinginkan). Dan jika nasehatnya tidak diterima, maka sungguh ia telah menunaikan kewajibannya”<sup>7</sup> (H.R Ahmad, dinyatakan sah oleh Syekh Albani)*

---

<sup>4</sup>Eri Hariyanto, *Komunikasi Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan*, diakses dari <https://klc.kemenkeu.go.id/pusku-komunikasi-pemerintah-dan-efektivitas-kebijakan/>, pada tanggal 21 April 2021 pukul 15:21 WIB.

<sup>5</sup>Zaenal Mukarom, *Komunikasi Politik* (Bandung : Pustaka Setia, 2016), h. 42.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, jilid 24 (Bīrūt : Mu’assasah Ar Risalah, 2001), h. 49.

Disamping komunikasi yang disampaikan tidak boleh terang-terangan dan juga tidak beramai-ramai, Islam juga menuntut untuk berlemah-lembut dalam bertutur kata terhadap penguasa/pemerintah, sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

*“Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, Sesungguhnya Dia telah melampaui batas; Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”.* (Q.S *Taha*[20] : 43-44)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Hārūn untuk berbicara kepada Fir'aun yang telah durhaka kepada Allah, melampaui batas, angkuh, dan sombong agar ia meninggalkan kesesatan dan patuh kepada Allah. Hal tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga dimana Nabi Musa masih tetap diperintahkan untuk berbicara dengan berlemah lembut kepada Fir'aun yang notabenenya begitu durhaka kepada Allah ﷻ. Kita tidak lebih baik dari Nabi Musa dan Hārūn, dan tentu pemerintah kita tidak lebih buruk dan lebih rusak dari Fir'aun, maka berlemah-lembutlah saat berbicara kepada mereka, dan jangan berkata-kata dengan perkataan yang kasar kepada dan terhadap mereka.

Diutusnya Nabi Hārūn untuk menemani Nabi Musa adalah permintaan Nabi Musa kepada Allah, karena pada mulanya, Allah hanya mengutus Nabi Musa seorang untuk menemui Fir'aun, namun Nabi Musa meminta kepada Allah agar ia ditemani oleh Hārūn v dalam urusannya tersebut, Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan nas sebelumnya karena Allah telah mengabulkan permintaan Nabi Musa tersebut.

## **Pemerintah dan Rakyat**

### **a. Definisi Pemerintah**

Pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah Negara. Tanpa pemerintah, negar tidak ada yang mengatur. Tidak mungkin ada suatu Negara tanpa pemerintah,<sup>8</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah jantung negara.

Definisi pemerintah menuju kepada alat perlengkapan negara seluruhnya (aparatur negara) sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas.<sup>9</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada tiga makna pemerintah, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya;

---

<sup>8</sup>Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), cet. 5, h. 175.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 176.

- 2) Pemerintah adalah sekelompok orang yg secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
- 3) Pemerintah adalah penguasa suatu negara (bagian negara).

Pemerintah disebut juga penguasa dan pemimpin negara. Pemerintah disebut juga pemimpin karena ia adalah orang yang memimpin negara. Dan disebut penguasa karena pemerintah adalah orang yang menguasai; orang yg berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, di Negara ini.

Sedangkan dalam Islam juga terdapat beberapa sebutan bagi orang yang mengatur negara yaitu, *ulul amri*, khalifah, imam. Di dalam nas-nas Alquran dan Hadis sering didapati kata imam dipakai untuk orang yang mengatur negara, seperti dalam hadis Rasulullah sebagai berikut.

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

“Agama adalah nasehat”, kami bertanya: “untuk siapa?” Nabi menjawab: “untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, imam-imam kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum” (H.R Muslim)

*Aimmatul muslimin* (imam-imam kaum muslimin) maksudnya adalah pemerintah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi bahwa imam-imam kaum muslimin adalah para khalifah dan orang selain mereka yang mengurus perkara kaum muslimin dari golongan orang yang memiliki *walāyah* (pemerintah).<sup>10</sup>

### **Fungsi pemerintah**

Aristoteles menyatakan dalam ajarannya; manusia adalah *Zoon Politicon* bahwa manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dan berkumpul dengan manusia lainnya. Manusia mempunyai insting dan nurani untuk bermasyarakat sehingga kehidupan menyendiri tanpa membutuhkan orang lain kemungkinan sangatlah kecil.<sup>11</sup>

Setiap pemerintah yang berkuasa pada suatu negara berkewajiban menciptakan kesejahteraan dan keamanan setiap warganya. Karena itu pemerintah memiliki kewenangan (legitimasi) untuk menggunakan kekuasaannya dalam mengendalikan perilaku anggota masyarakat.<sup>12</sup> Berikut adalah fungsi pemerintah:

- 1) Pelayanan

<sup>10</sup>Muslim Bin Al-Hajjāj An-Naisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1 (Bīrūt : Dar Iḥyā’ at Turās al ‘Arabiy, 1954), h. 74.

<sup>11</sup>Mawardi, Nur Hidayati, *IAD-ISD-IBD* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), cet. 6, h. 239.

<sup>12</sup>Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi* (Depok : Rajawali Pers, 2018), cet. 6, h. 36.

Secara umum pelayanan yang dilaksanakan pemerintah mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilaksanakan pemerintah pusat merangkum masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan, agama, pertahanan dan keamanan.

## 2) Pengaturan

Dalam urusan ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki faedah untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang menata hubungan insan di dalam masyarakat supaya kehidupan berlangsung lebih harmonis dan dinamis.

## 3) Pembangunan

Pemerintah juga bermanfaat sebagai pemacu pembangunan, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pembangunan yang dimaksud di sini ialah pembangunan infrastruktur dan pun pembangunan mental spiritual penduduk negara

## 4) Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan ini bertujuan untuk menyokong otonomi wilayah sehingga masing-masing wilayah dapat mengelola sumber daya secara maksimal. Untuk menjangkau tujuan itu maka pemerintah wilayah harus menambah peran serta masyarakat dan swasta dalam pekerjaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>13</sup>

## **Tugas Pemerintah**

Tugas pemerintah adalah selalu berusaha untuk memberikan tiga bentuk pelayanan, yakni:

- 1) Menciptakan tatanan (*order*) dalam bentuk jaminan keamanan guna memproteksi hak-hak milik warga negaranya.
- 2) Menyediakan fasilitas umum (*public goods*) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi tuntutan hidupnya sebagai anggota masyarakat.
- 3) Berusaha mengangkat derajat persamaan antara sesama manusia (*equality*), sehingga tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan, melainkan memiliki kesempatan yang sama atas prinsip keadilan untuk memperoleh akses dalam berusaha dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah.<sup>14</sup>

## **Hak-Hak Pemerintah**

---

<sup>13</sup>Aris Kurniawan, *Pengertian Pemerintah Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pemerintah-adalah/#ftoc-heading-35>, pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 1:36 WIB.

<sup>14</sup>Cangara, *Komunikasi*, h. 38.

Dalam Islam Hak pemerintah hanya satu, yaitu ditaati perintahnya selagi tidak disuruh untuk bermaksiat kepada Allah, dan hal ini terdapat penjelasan yang banyak dalam Alquran dan Hadis Rasulullah mengenai hal tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut.

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحَشَرَ النَّاسُ ضُحَىٰ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Q.S An Nisā [4] : 59)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ هُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ

الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ»، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ:

«تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

“Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu, pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia.” Aku berkata (Khuzaiifah bin Yaman), “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?” Beliau bersabda, “Dengarlah dan ta’at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka.” (HR. Muslim)

Bahkan Rasulullah mensifati orang yang mati dan ia tidak taat kepada pemerintah, maka ia mati seperti matinya orang jahiliyyah, yaitu mati dalam kesesatan dan kekacauan, karena tidak ada Imam bagi mereka masyarakat jahiliyah dan tidak ada aturan,<sup>15</sup> sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ،

مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

“barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan (pada penguasa/pemerintah) maka pasti ia akan menjumpai Allah dengan tanpa argumen

<sup>15</sup>Ibid., h. 1476.

*pembelaan baginya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati seperti mati orang jahiliyah” (H.R Muslim).*

### **Warga Negara (Rakyat)**

Warga Negara atau rakyat merupakan salah satu unsur hakiki dan pokok status negara. Rakyat suatu negara adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut.<sup>16</sup> Rakyat juga diartikan sebagai kumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persatuan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Kansil, orang yang berada dalam wilayah suatu negara itu dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. *Penduduk* ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu itu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Penduduk dapat dibedakan menjadi dua pula, yaitu :

- 1) Penduduk negara atau warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri.
- 2) Penduduk bukan warga negara atau orang asing adalah penduduk yang bukan warga negara.

Sedangkan *Bukan Penduduk* adalah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.<sup>18</sup>

### **Hak Rakyat Terhadap Pemerintah**

Secara garis besar, hak warga negara sepanjang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

- 1) Sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

---

<sup>16</sup> Tukiran Taniredja, dkk, *Paradigma Terbaru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa* (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 70.

<sup>17</sup> Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, h. 177.

<sup>18</sup> *Ibid.*

- 4) Hak untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
- 5) Hak untuk mendapat pendidikan.
- 6) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 7) Hak khusus fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.
- 8) Hak fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>19</sup>

Inilah hak-hak warga negara secara umum yang ditinjau berdasarkan UUD 1945, tentunya setiap negara mempunyai penilaian masing-masing terhadap hak warga negaranya.

Sedangkan dalam Islam sendiri termasuk hak rakyat terhadap pemerintah adalah menasehatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ.

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

“Agama adalah nasehat”, kami bertanya: “untuk siapa?” Nabi menjawab: “untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, imam-imam kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum” (H.R Muslim)

*Aimmatul muslimin* (imam-imam kaum muslimin) maksudnya adalah pemerintah, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi menerangkan bahwa nasehat untuk *Aimmatul muslimin* bekerja sama, tolong menolong, dan saling membantu mereka diatas yang hak, menaati mereka.<sup>20</sup>

### **Kewajiban Warga Negara**

Di samping warga negara memiliki hak, juga memiliki kewajiban, yang harus dilaksanakan, Kewajiban warga negara secara garis besar adalah sebagaimana yang diatur UUD 1945:

- 1) Taat kepada hukum dan pemerintahan.
- 2) Ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Mengikuti pendidikan dasar.
- 4) Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 5) Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

tentunya setiap negara mempunyai penilaian masing-masing terhadap kewajiban warga negaranya.

<sup>19</sup>Taniredja, *Paradigma Terbaru Pendidikan*, h. 84.

<sup>20</sup>Muslim, *Ṣaḥīḥ*, jilid 1, h. 74.

## Pengertian Alquran

Menurut bahasa, Alquran tentunya berasal dari bahasa Arab. “*Qara’a*” memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. *Qirā’ah* berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kata yang teratur. Alquran asalnya sama dengan *qirā’ah*, yaitu akar kata (masdar-infinitif) dari *qara’a*, *yaqra’u*, *qirā’atan wa qur’ānan*.<sup>21</sup>

Para ahli berbeda pendapat tentang asal kata Alquran, ada yang mengatakan Alquran berasal dari kata *qarana* yang berarti menggaungkan sesuatu dengan yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Asy’ari (wafat 324 H). Ada juga yang mengatakan Alquran berasal dari kata *qarā’in*, bentuk jamak dari kata *qarīnah* yang berarti petunjuk atau indikator.

Sedangkan Imam Asy-Syafi’i (wafat 204 H) mengatakan bahwa Alquran adalah *ism ‘alam* dengan timbangan (*wazan*) *Fu‘lan*, berdiri sendiri, tidak berasal dari kata apapun yang sejak awal secara khusus di gunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad, sebagaimana nama kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil.<sup>22</sup>

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. Bahkan keberadaan metode tersebut akan membentuk karakter keilmiah dari sebuah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berusaha mendapatkan dan mengolah data-data kepustakaan untuk mendapatkan jawaban dari masalah pokok yang diajukan. Berdasarkan sumber data, adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur terhadap berbagai kitab, buku, jurnal dan berbagai karya yang ada, khususnya yang berkaitan dengan Komunikasi antara pemerintah dan rakyat, dimana data-data yang dihasilkan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Mengutus Seorang Delegasi

---

<sup>21</sup>Mannā’ al-Qaṭṭān, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, terj. Aunur Rafiq el-Mazni (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2017), cet. 15, h.16.

<sup>22</sup>Amari Ma’ruf, Nur Hadi, *Mengkaji Ilmu Tafsir 1 Untuk Kelas X Madrasah Aliyah Program Keagamaan* (Solo : Aqila, 2014), h. 5.

Ketika rakyat ingin mendatangi pemerintah, menasehati, menegur dan mengkritik pemerintah, rakyat hendaknya mengutus seorang delegasi yang mewakili mereka untuk menyampaikan itu semua terhadap pemerintah. Orang yang didelegasikan mewakili rakyat untuk mendatangi pemerintah haruslah seorang tokoh yang berpengaruh dan diketahui kepiawaiannya dalam berkomunikasi.

## 2. Berkata dengan Lemah Lembut

Sang delegasi haruslah berkata-kata lembut, tidak keras dalam menyampaikan maksud dan tujuan ia datang dan menghadap ke pemerintah, apalagi berkata-kata kasar kepada mereka. Hal ini dapat melembutkan hati mereka untuk mendengarkan keluhan rakyat atas izin Allah tentunya.

## 3. Memperkenalkan Diri

Sang delegasi juga harus memperkenalkan diri mereka saat menyampaikan maksud dan tujuan mereka saat mendatangi pemerintah, darimana mereka berasal, siapa yang mengutus mereka, hal tersebut adalah informasi penting yang perlu disampaikan saat menghadap kepada pemerintah.

## 4. Menjelaskan Maksud dan Tujuan

Sang delegasi juga harus menjelaskan maksud dan tujuan ia datang dan menghadap kepada pemerintah dengan jelas dan benar. Ia harus menjelaskan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menasehati, menegur, atau memberi kritik dan saran kepada pemerintah, agar kehidupan bernegara menjadi lebih baik lagi kedepannya atas izi Allah.

## 5. Mengajak kepada Islam

Jika aparat pemerintahan yang didatangi qadarullah adalah bukan seorang muslim, maka diantara maksud dan tujuan mendatanginya adalah untuk mengajak dan menyerunya kepada Islam. Tidaklah mengapa menyeru mereka kepada Islam didalam majelis mereka sebagai aparat pemerintahan, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah dan menerima ajakan dan memeluk Islam.

## 6. Menyampaikan dengan Hikmah

Hendaklah pesan-pesan dan nasehat-nasehat yang disampaikan kepada pemerintah disampaikan dengan hikmah, hikmah disini adalah bukti-bukti dan argument-argumen yang jelas, logis dan dapat mudah diterima, yaitu Alquran dan Hadis Rasulullah. Argumen yang disampaikan dengan berlandaskan Alquran dan Sunnah diatas pemahaman Salafus Salih mustahil untuk ditolak, karena fitrah manusia adalah mematuhi perintah Allah dan tidak mungkin menolaknya.

## 7. Berdoa dan Memberikan Keselamatan

Jika telah membawa nasehat dan tergunan kepada pemerintah yang merupakan pesan dari Allah karena pesan tersebut dilandasi dari Alquran dan Sunnah berdasarkan pemahaman Salafus Salih, maka hendaklah memberikan dorongan dan semangat kepada pemerintah untuk menyetujui hal tersebut, karena yang menunggu mereka adalah keselamatan jika mengikuti petunjuk dari Allah walau mungkin terasa berat untuk mengikuti nasehat tersebut. Jika hal tersebut benar adalah perintah Allah, mengikutinya akan mendapatkan keselamatan dan jalan keluar atas izin Allah.

## 8. *Targīb* dan *Tarhīb*

Menyampaikan *targīb* dan *tarhīb*/ancaman dan motivasi adalah bagian dari kelengkapan menyampaikan perintah Allah terhadap pemerintah. Kedua hal ini penting untuk disampaikan sebagai satu padu baik ancaman bagi yang ingkar dan motivasi serta balasan kebaikan bagi orang yang taat dan tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya *tarhib*/ancaman bagi yang ingkar membuat orang takut untuk melanggar perintah Allah dan termotivasi serta bersemangat untuk mematuhi perintah Allah dengan adanya *tarhib*/motivasi.

## 9. Mendebati dengan Cara yang Ahsan

Jika terjadi perdebatan yang tidak terelakkan saat menyampaikan pesan terhadap pemerintah, maka debatilah mereka dengan cara yang ahsan/terbaik atau paling baik agar tidak menimbulkan permusuhan dan pertengkaran, karena tujuan sang delegasi datang mendatangi pemerintah adalah untuk islah atau perbaikan/kebaikan, bukan untuk menyebar kebencian dan mencari permusuhan.

## 10. Memberikan Nasehat dan Peringatan

Memberikan nasehat dan peringatan tidak hanya pada aparat pemerintah yang ditemui dan dikunjungi, melainkan kepada para bawahan dan orang kepercayaan mereka juga perlu diberikan nasehat dan peringatan jika memungkinkan. Jika mereka menerima ajakan kita, maka hal tersebut dapat memberikan kemudahan dan wasilah untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah karena mereka kelak akan menyampaikan pesan yang sama terhadap pemerintah sehingga kegiatan “negosiasi” akan lebih efektif.

## 11. Tidak Menaati Pemerintah dalam Hal Maksiat

Rakyat wajib menaati pemerintah selagi hal yang diperintahkan tidak dalam bermaksiat kepada Allah, jika pemerintah menyuruh rakyat untuk bermaksiat kepada Allah, maka rakyat tidak wajib untuk mematuhi, karena tiada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan terdahulu dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan rakyat yang terdapat dalam Alquran pada surah *Taha* terdapat 11 poin penting yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan pemerintah yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Masyarakat/rakyat yang ingin menyampaikan pesan terhadap pemerintah hendaknya mengutus seorang delegasi yang mewakili mereka, dan tidak mendatanginya dengan beramai-ramai.
2. Bersopan santun dan berlemah lembut saat berbicara kepada pemerintah.
3. Sang delegasi memperkenalkan diri kepada aparat pemerintah yang didatanginya termasuk memberitahukan kepada pemerintah siapa yang mengutus mereka.
4. Menjelaskan maksud dan tujuan datangnya sang delegasi mendatangi pemerintah dengan jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi agar tidak terjadi salah faham.
5. Mengajak kepada Islam jika aparat yang didatangi qadarullah bukan pemeluk agama Islam.
6. Menyampaikan pesan dengan hikmah, yaitu membawa bukti-bukti yang jelas perihal pesan yang disampaikan dengan berlandaskan Alquran dan hadis berdasarkan pemahaman Salaful Ummah.
7. Berdoa dan memberikan keselamatan untuk memberikan semangat kepada pemerintah bahwa keselamatan menanti mereka jika mengikuti pesan yang berlandaskan Alquran dan hadis berdasarkan pemahaman Salaful Ummah.
8. Memberikan motivasi dan ancaman (taghib dan tarhib) menguatkan hati mereka untuk mengikuti pesan yang datangnya dari Allah tersebut.
9. Debatlah pemerintah dengan cara yang paling baik/terbaik jika terjadi perdebatan tidak dapat terelakkan.
10. Jika memungkinkan, nasehat dan peringatan yang diberikan tidak hanya untuk aparat pemerintah yang didatangi melainkan bawahannya juga.
11. Rakyat tidak boleh mematuhi pemerintah dalam hal maksiat kepada Allah, jika pemerintah melarang rakyat untuk beriman kepada Allah, maka rakyat tidak boleh menaatinya, karena tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah.



## PUSTAKA ACUAN

- Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥambal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥambal*, Bīrūt: Muassasah Ar-Risālah, 2001 M, jilid 24.
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009 M.
- Al-Mubārakfuri, Ṣafiyū Ar-Raḥmān, dkk, *Ṣaḥīḥ Tafsīr Ibnu Kaṣīr* terjemahan oleh Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018 M, jilid 5.
- Al-Qaṭṭān, Mannā', *Pengantar Studi Ilmu Alquran* Terjemahan oleh Aunur Rafiq el-Mazni, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2017 M.
- An-Naisābūriy, Muslim Bin Al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bīrūt: Dar Ihyā' at-Turās al 'Arabiy, 1954 M, jilid 1.
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*, Depok: Rajawali Pers, 2018 M.
- Kriyantono, Rachmat, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi*, Jakarta:
- Kurniawan, Aris, *Pengertian Pemerintah Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pemerintah-adalah/#ftoc-heading-35>.
- Ma'ruf, Amari, dan Nur Hadi, *Mengkaji Ilmu Tafsir 1 Untuk Kelas X Madrasah Aliyah Program Keagamaan*, Solo: Aqila, 2014 M.
- Mawardi, dan Nur Hidayati, *IAD-ISD-IBD*, Bandung: Pustaka Setia, 2000 M.
- Mukarom, Zaenal, *Komunikasi Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2016 M.
- Taniredja, Tukiran, dkk, *Paradigma Terbaru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta, 2017 M.
- Sumber Internet:
- Flora, Maria, *Demo Anarkis Ini Deretan Fasilitas Umum di Jakarta yang Dirusak Massa Perusuh*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4377582/demo-anarkistis-ini-deretan-fasilitas-umum-di-jakarta-yang-dirusak-massa-perusuh>.
- Hariyanto, Eri, *Komunikasi Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan*, diakses dari <https://klc.kemenkeu.go.id/pusku-komunikasi-pemerintah-dan-efektivitas-kebijakan/>.